

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT OLEH PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT DI KOTA
PADANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Kasus Narkotika)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Jinayah Siyasah

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Oleh:

**ADE DARMAYENI
1413040626**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI`AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat di Kota Padang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Kasus Narkotika) disusun oleh Ade Darmayeni, BP. 141304026 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Padang, 10 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

ABSTRAK

Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di Indonesia. Tujuannya untuk membantu pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya terhadap negara, disebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus memberikan pelayanan dan bantuan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi maupun materi, teraniaya, terzalimi, orang yang tidak mengetahui hukum. Namun faktanya pada tahun 2015- 2017 PAHAM SUMBAR banyak menangani kasus Narkotika yaitu hampir 75 persen, sedangkan dalam Islam Narkotika adalah suatu zat yang diharamkan karena dapat memabukkan dan bisa mengilangkan kesadaran manusia. Bahkan telah diatur dalam Undang- Undang No.35 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Narkotika. Berdasarkan uraian di atas penulisan tertarik untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan pemberian

bantuan hukum oleh PAHAM SUMBAR, kenapa PAHAM SUMBAR banyak menangani kasus Narkotika, dan bagaimana pemberian bantuan hukum

terhadap kasus Narkotika ditinjau dari hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan mengadakan penelitian langsung di Kantor PAHAM

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

SUMBAR untuk mencari data yang berhubungan dengan masalah yang

ditulis dalam karya ilmiah ini. Dari penelitian di atas penulis menyimpulkan,

1.No watermark on the output documents.

2.Can operate scanned PDF files via OCR.

3.No page quantity limitations for converted PDF files.

PAHAM SUMBAR berfungsi dengan memberikan bantuan

hukum baik berupa tugas (penanganan kasus, pendampingan

kepengadilan) maupun nonlitigas (konsultasi dan penyuluhan hukum).

Namun di dalam memberikan bantuan hukum PAHAM SUMBAR banyak

menangani kasus Narkotika dikarenakan banyak masuk kasus Narkotika dan

semakin maraknya terjadi masyarakat. Dalam Islam sanksi yang dikenakan

bagi penyalahgunaan Narkotika adalah ta'zir, namun memberikan bantuan

hukum kepada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana

dibolehkan. Bahkan Allah SWT memerintahkan setiap muslim menjadi saksi

dan saling membantu dalam perkara peradilan. Sehingga PAHAM SUMBAR

harus menanganinya, karena PAHAM SUMBAR fungsinya memberikan

bantuan kepada orang yang tidak paham dengan hukum, orang yang tidak

mampu, orang terniaya dan orang terzalimi. Supaya mereka mendapatkan

hak-haknya di depan hukum atau pengadilan.

ABSTRACT

The background of this thesis is the existence of Law Number 16 Year 2011 regarding legal aid in Indonesia. The goal is to help the government to carry out its task towards this state, as many people do not get legal aid. Under such circumstances, the government needs to provide the best possible services and assistance to the poor and economically incompetent, abusive, tyrannical, unfamiliar people. But in fact, 2015- 2017 PUNAM SUMBAR deal with Narcotics cases of almost 75 percent, while in Islam Narcotics are a banned substance because it can be intoxicating and can eliminate human well-being. It has also been regulated in Law No. 35 of 2009 describing Narcotics. Based on the description above the writers are keen to know, how the implementation of legal aid by PAHAM SUMBAR, why PAMAM SUMBAR deal with Narcotics case, and how giving legal aid to narcotics case is reviewed from Islamic law. In writing this thesis, the writer uses qualitative field research method by conducting direct research at PAHAM SUMBAR Office to find data related to the problem written in this scientific paper. From the above analysis the writer concludes that the implementation of legal assistance by PAHAM SUMBAR has implemented its functions in the community by providing legal assistance in the form of legal action (case lawsuit, court counseling) and non litigas (legal consultation and

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

However, in providing legal assistance, the PAHAM SUMBAR deal with Narcotics cases as many enter the Narcotics case and the community becomes increasingly popular. In Islam the punishment imposed on abuse of narcotics is ta zir, but provides legal assistance to those who have committed acts of crime allowed. Even Allah SWT instructs every Muslim to be a witness and mutual help in court cases. Until PUBLIC SUMMARY have to deal with it, because PUBLIC SUMMARY its functions provide assistance to people who do not understand the law, the inability, the deceased and the oppressed. So they get their right before the law or the court.